

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Deskripsi Teoritis**

#### **1. Tinjauan Tentang Konsep Sikap**

##### **1.1 Pengertian Sikap**

Menurut Zimbardo dan Ebbesen dalam Abu Ahmadi (2009 : 150 ) “sikap adalah suatu predisposisi (keadaan mudah terpengaruh) terhadap seseorang, ide atau objek yang berisi komponen-komponen kognitif, afektif, konatif.. Sedangkan D. Krech and RS. Crutchfield dalam Abu Ahmadi (2009 : 150) berpendapat bahwa “sikap adalah organisasi yang tetap dari proses motivasi, emosi, persepsi atau pengamatan atas suatu aspek dari kehidupan individu”.

M. Munandar Soelaeman (2000: 47) juga berpendapat mengenai sikap. “Sikap dalam hal ini adalah kecenderungan atau kesiapan seseorang untuk bertindak laku tertentu kalau menghadapi suatu rangsangan tertentu. Jadi apabila ada stimulus, komponen kognisi, afeksi konasi akan menentukan suasana sikap”. Menurut Morgan dalam M. Munandar Soelaeman (2000: 294), “Sikap adalah kecenderungan untuk berespons, baik secara positif ataupun negatif, terhadap orang, objek, atau situasi”. Tentu saja kecenderungan untuk berespon ini meliputi perasaan atau pandangannya, yang tidak sama dengan tingkah laku. Sikap seseorang baru diketahui bila

ia sudah bertingkah laku. Sikap merupakan salah satu determinan dari tingkah laku, selain motivasi dan norma masyarakat. Oleh karena itu kadang-kadang sikap bertentangan dengan tingkah laku.

Pendapat para ahli tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa Sikap adalah pandangan terhadap suatu objek baik secara positif maupun negatif, apabila ada sebuah rangsangan terhadap dirinya akan diaplikasikan ke dalam sebuah perilaku. Dalam sikap terkandung suatu penilaian emosional yang dapat berupa suka, tidak suka, senang, sedih, cinta, benci, dan sebagainya. Karena dalam sikap ada suatu kecenderungan berespons, maka seseorang mempunyai sikap yang umumnya mengetahui perilaku atau tindakan apa yang akan dilakukan bila bertemu dengan objeknya. Dari uraian tersebut dapatlah disimpulkan, bahwa sikap mempunyai komponen-komponen, yakni:

- a. Kognitif: artinya memiliki pengetahuan mengenai objek sikapnya, terlepas pengetahuan itu benar atau salah.
- b. Afektif: artinya dalam bersikap akan selalu mempunyai evaluasi emosional (setuju-tidak setuju) mengenai objek sikapnya.
- c. Konatif: artinya kecenderungan bertingkah laku bila bertemu dengan objek sikapnya, mulai dari bentuk yang positif (tindakan sosialisasi) sampai pada yang sangat aktif (tindakan agresif).

## 1.2 Ciri-ciri Sikap

Abu Ahmadi (2009: 164-165), “Sikap menentukan jenis atau tabiat tingkah laku dalam hubungannya dengan perangsang yang relevan, orang-orang atau kejadian-kejadian”. Dapatlah dikatakan bahwa sikap merupakan faktor internal, tetapi tidak semua faktor internal adalah sikap. Adapun ciri-ciri sikap yang dituliskan oleh Abu Ahmadi dalam bukunya yang berjudul Psikologi Sosial adalah sebagai berikut:

a. Sikap itu dipelajari (*learnability*)

Sikap merupakan hasil belajar ini perlu dibedakan dari motif-motif psikologi lainnya. misalnya lapar, haus, adalah motif psikologis yang tidak dipelajari, sedangkan pilihan kepada makanan Eropa adalah sikap. Beberapa sikap dipelajari tidak sengaja dan tanpa kesadaran kepada sebagian individu. Barangkali yang terjadi adalah mempelajari sikap dengan sengaja bila individu mengerti bahwa hal itu akan membawa lebih baik (untuk dirinya sendiri), membantu tujuan kelompok, atau memperoleh sesuatu nilai yang sifatnya perseorangan.

b. Memiliki kestabilan (*stability*)

Sikap bermula dapat dipelajari, kemudian menjadi lebih kuat, tetap, dan stabil, melalui pengalaman. Misalnya perasaan *like* dan *dislike* terhadap warna tertentu (spesifik) yang sifatnya berulang-ulang atau memiliki frekuensi yang tinggi.

c. *Personal-societal significance*

Sikap melibatkan hubungan antara seseorang dan orang lain dan juga antara orang dan barang atau situasi. Jika seseorang merasa bahwa orang lain menyenangkan, terbuka serta hangat, maka ini akan sangat berarti bagi dirinya, ia merasa bebas, dan *favorable*.

d. Berisi *cognisi dan affeksi*

Komponen *cognisi* daripada sikap adalah berisi informasi yang faktual, misalnya objek itu dirasakan menyenangkan atau tidak menyenangkan.

e. *Approach-avoidance directionality*

Bila seseorang memiliki sikap yang *favorable* terhadap sesuatu objek, mereka akan mendekati dan membantunya, sebaliknya bila seseorang memiliki sikap yang *unfavorable*, mereka akan menghindarinya.

### 1.3 Karakteristik Sikap

Menurut Seitel dalam Soemirat dan Yehuda (2001: 218), sikap didasari kepada sejumlah karakteristik, yaitu sebagai berikut :

- a. Personal : Faktor secara fisik dan emosional suatu individu, termasuk ukuran fisik, umur dan status sosial.
- b. Budaya : Lingkungan dan gaya hidup dari suatu daerah geografis tertentu.
- c. Pendidikan : Tingkat dan kualitas pendidikan seseorang.
- d. Keluarga : Asal-usul keluarga
- e. Agama : Suatu sistem kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- f. Kelas Sosial : Posisi dalam masyarakat, perubahan status sosial seseorang akan mempengaruhi sikap seseorang.
- g. Ras etnik asli

## **1.4 Komponen Sikap**

Travers, Gagne, dan Cronbach dalam Abu Ahmadi (2009: 151-152) sependapat bahwa sikap melibatkan tiga komponen yang saling berhubungan dan rupanya pendapat ini diterima sampai saat ini yaitu:

### **1.4.1 Komponen Kognitif**

Berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran yang didasarkan pada informasi, yang berhubungan dengan objek.

Misalnya : orang tahu bahwa uang itu bernilai, karena mereka melihat harganya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kita terhadap uang itu mengandung pengertian bahwa kita tahu tentang nilai uang.

### **1.4.2 Komponen Afektif**

Menunjuk pada dimensi emosional dari sikap, yaitu emosi yang berhubungan dengan objek. Objek di sini dirasakan sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan.

Misalnya : Jika orang mengatakan bahwa mereka senang uang, ini melukiskan perasaan mereka terhadap uang.

### **1.4.3 Komponen Konatif**

Melibatkan salah satu predisposisi untuk bertindak terhadap objek. Misalnya : Karena uang adalah sesuatu yang bernilai, orang menyukainya, dan mereka berusaha (bertindak) untuk mendapat gaji yang besar. Komponen behavior ini dipengaruhi oleh komponen kognitif. Komponen ini berhubungan dengan kecenderungan untuk bertindak (action tendency), sehingga

dalam beberapa literatur komponen ini disebut komponen action tendency.

Apabila individu memiliki sikap yang positif terhadap suatu objek ia akan siap membantu, memperhatikan, berbuat sesuatu yang menguntungkan objek itu. Sebaliknya bila ia memiliki sikap yang negatif terhadap suatu objek, maka ia akan mengecam, mencela, menyerang bahkan membinasakan objek itu.

### **1.5 Aspek Sikap**

Menurut Abu Ahmadi (2009: 149) menyebutkan sikap mempunyai tiga aspek yaitu :

#### **1.5.1 Aspek Kognitif**

Yang berhubungan dengan gejala mengenal pikiran. Ini berarti berwujud pengolahan, pengalaman, dan keyakinan serta harapan-harapan individu tentang objek atau kelompok objek tertentu.

#### **1.5.2 Aspek Afektif**

Berwujud proses yang menyangkut perasaan-perasaan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipati, dan sebagainya yang ditujukan kepada objek-objek tertentu.

### 1.5.3 Aspek Konatif

Berwujud proses tendensi/kecenderungan untuk berbuat sesuatu objek, misalnya : kecenderungan memberi pertolongan, menjauhkan diri dan sebagainya.

## 1.6 Fungsi Sikap

Abu Ahmadi (2009: 165-167) Fungsi (tugas) sikap dapat dibagi menjadi empat golongan, yaitu :

- a. Sikap berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan. Bahwa sikap adalah sesuatu yang bersifat communicabel, artinya sesuatu yang mudah menular, sehingga mudah pula menjadi milik bersama. Justru karena itu sesuatu golongan yang mendasarkan atas kepentingan bersama dan pengalaman bersama biasanya ditandai oleh adanya sikap anggotanya yang sama terhadap suatu objek. Sehingga dengan demikian sikap bisa menjadi rantai penghubung antara orang dengan kelompoknya atau dengan anggota kelompoknya yang lain. Oleh karena itu anggota-anggota kelompok yang mengambil sikap sama terhadap objek tertentu dapat meramalkan tingkah laku terhadap anggota-anggota lainnya.
- b. Sikap berfungsi sebagai alat pengatur tingkah laku. Kita tahu bahwa tingkah laku anak kecil dan binatang pada umumnya merupakan aksi-aksi yang spontan terhadap sekitarnya. Antara perangsang dan reaksi tidak ada pertimbangan, tetapi pada anak dewasa dan yang sudah lanjut usianya perangsang itu pada umumnya tidak diberi reaksi secara spontan, akan tetapi terdapat adanya proses secara sadar untuk menilai

perangsang-perangsang itu. Jadi antara perangsang dan reaksi terdapat sesuatu yang disisipkannya yaitu sesuatu yang berwujud pertimbangan-pertimbangan/penilaian-penilaian terhadap perangsang itu sebenarnya bukan hal yang berdiri sendiri, tetapi merupakan sesuatu yang erat hubungannya dengan cita-cita orang, tujuan hidup orang, peraturan-peraturan kesusilaan yang ada dalam masyarakat, keinginan-keinginan pada orang itu dan sebagainya.

- c. Sikap berfungsi sebagai alat pengatur pengalaman-pengalaman. Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa manusia di dalam menerima pengalaman-pengalaman dari dunia luar sikapnya tidak pasif, tetapi diterima secara aktif, artinya semua pengalaman yang berasal dari luar itu tidak semuanya dilayani oleh manusia, tetapi manusia memilih mana yang perlu dan mana yang tidak perlu dilayani. Jadi semua pengalaman ini diberi penilaian, lalu dipilih.
- d. Sikap berfungsi sebagai pernyataan kepribadian. Sikap sering mencerminkan pribadi seseorang, ini sebabnya karena sikap tidak pernah terpisah dari pribadi yang mendukungnya. Oleh karena itu dengan melihat sikap-sikap pada objek-objek tertentu, sedikit banyak orang bisa mengetahui pribadi orang tersebut. Jadi sikap sebagai pernyataan pribadi. Apabila kita akan mengubah sikap seseorang, kita harus mengetahui keadaan yang sesungguhnya dan pada sikap orang tersebut dan dengan mengetahui keadaan sikap itu kita akan mengetahui pula mungkin tidaknya sikap tersebut diubah dan bagaimana cara mengubahnya sikap-sikap tersebut.



## **1.7 Teori Organisasi Sikap**

Berikut ini merupakan beberapa teori organisasi sikap menurut Saifudin Azwar (2012: 40-45) :

### **1.7.1 Teori Keseimbangan dari Heider**

Menurut Fritz Heider asumsi dasar teori ini menekankan pada adanya hubungan keseimbangan atau ketidakseimbangan antara 12 unsur-unsur individu (I), orang lain (O), dan objek sikap (Ob). Keadaan seimbang terjadi jika hubungan antara (I), (O), dan (Ob) berjalan harmonis, sedangkan jika hubungan ketiganya tidak harmonis menyebabkan bahwa persepsi orang terhadap bentuk hubungan antara unsure (I), (O), dan (Ob) memegang peranan penting dalam menentukan keseimbangan yang terjadi. Dengan demikian menurut teori ini perubahan sikap dapat dilakukan dengan menciptakan kesamaan persepsi antara (I), dan (O) terhadap (Ob) sikap.

### **1.7.2 Teori Konsistensi Afektif-Kognitif dari Rosenberg**

Teori ini berasumsi bahwa komponen afeksi senantiasa berhubungan dengan komponen kognisi dan hubungan tersebut dalam keadaan konsisten. Orang berusaha membuat kognisinya konsisten dengan afeksinya. Dengan kata lain, keyakinan seseorang, pendirian seseorang dan pengetahuan seseorang tentang suatu fakta sebagian ditentukan oleh pilihan afeksinya. Konsekuensinya bila terjadi perubahan dalam komponen akan menimbulkan perubahan pada komponen kognisi. Untuk itu dalam

mengubah, maka komponen diubah lebih dahulu kemudian akan mengubah komponen kognisi serta diakhiri dengan perubahan sikap.

### 1.7.3 Teori Dimensi Kognitif dari Festinger

Asumsi dasar teori ini adalah sikap berubah demi mempertahankan konsistensinya dengan perilaku nyata. Seringkali manusia dihadapkan pada adanya konflik antara berbagai kognisi, sikap, bahkan antara sikap dengan perilaku. Keadaan ini disebut *disonasi*. Usaha mengurangi disonasi dapat dilakukan dengan mengubah salah satu atau dua unsur kognisi, bahkan dapat juga dilakukan dengan menambah kognisi baru. Cara spesifik yang dilakukan adalah dengan mengubah perilaku, mengubah unsur kognisi dari lingkungan dan menambah unsur kognisi yang baru.

### 1.7.4 Teori Kesesuaian Osgood dan Tannenbaum

Pokok prinsip kesesuaian (*congruity principle*) yang dirumuskan oleh Osgood dan Tannenbaum (1955), dalam Secord and Backman (1964) mengatakan bahwa unsur-unsur kognitif mempunyai valensi positif atau valensi negatif dalam berbagai intensitas atau mempunyai valensi nol. Unsur-unsur yang relevan satu sama lain dapat mempunyai hubungan positif ataupun negatif. Kesesuaian akan terjadi apabila kesemua hubungan bervalensi nol atau bila dua diantaranya bervalensi negatif dengan intensitas yang sama. Sebagai contoh, seseorang yang sangat menyukai musik klasik dan mempunyai seorang kenalan yang tidak begitu akrab, suatu ketika mengetahui bahwa kenalannya itu juga sangat menyukai

musik klasik. menurut teori ini mereka akan menjadi bertambah akrab dan lebih saling menyukai dan sekaligus mungkin berkurang kesukaannya terhadap musik klasik sehingga intensitas sikap terhadap kenalan dan sikap terhadap musik klasik akan bergeser. Bila dua objek yang berkaitan itu, yaitu kenalan dan musik klasik telah dinilai dengan intensitas yang sama maka tercapailah kesesuaian.

#### 1.7.5 Teori Fungsional Katz

Teori fungsional yang dikemukakan oleh Katz mengatakan bahwa untuk memahami bagaimana sikap menerima dan menolak perubahan haruslah berangkat dari dasar motivasional sikap itu sendiri. Apa yang dimaksud oleh Katz sebagai dasar motivasional merupakan fungsi sikap bagi individu yang bersangkutan.

#### 1.7.6 Teori Tiga Proses Perubahan Kelman

Kelman (1958) mengemukakan teorinya mengenai organisasi sikap dengan menekankan konsepsi mengenai berbagai cara atau proses yang sangat berguna dalam memahami fungsi pengaruh sosial terhadap perubahan sikap. Lebih jauh, teori Kelman sangat relevan dengan permasalahan perubahan sikap manusia. Secara khusus Kelman menyebutkan adanya tiga proses sosial yang berperan dalam proses perubahan sikap, yaitu ketersediaan (*compliance*), identifikasi (*identification*), dan internalisasi (*internalization*).

## **1.8 Pengukuran Sikap**

Para ahli Psikologi Sosial telah berusaha untuk mengukur sikap dengan berbagai cara. Beberapa bentuk pengukuran sudah mulai dikembangkan sejak diadakannya penelitian sikap yang pertama yaitu pada tahun 1920. Kepada subjek diminta untuk merespons objek sikap dalam berbagai cara. Pengukuran sikap ini dapat dilakukan secara langsung (Direct measure of attitudes) dan tidak langsung (Indirect measure of attitudes). (Whittaker dalam Abu Ahmadi, 2009: 168).

### **1.8.1 Pengukuran sikap secara langsung**

Pada umumnya digunakan tes psikologi yang berupa sejumlah item yang telah disusun secara hati-hati, seksama, selektif sesuai dengan kriteria tertentu. Tes psikologi ini kemudian dikembangkan menjadi skala sikap. Dan skala sikap ini diharapkan mendapat jawaban atas pertanyaan dengan berbagai cara oleh responden terhadap suatu objek psikologi. Pengukuran sikap secara langsung yang sering digunakan antara lain :

1. Skala Thurstone
2. Skala Likert
3. Skala Bogardus
4. Skala Perbedaan Semantik

### 1.8.2 Pengukuran sikap secara tidak langsung

Dalam suatu teknik tidak langsung, seorang peneliti memberikan gambar-gambar kepada subjek, subjek diminta untuk menceritakan apa-apa yang ia lihat dari gambar itu. Jawaban subjek kemudian di score yang memperlihatkan sikapnya terhadap orang atau situasi di dalam gambar itu. Seperti yang dilakukan Proshansky (1943), yang menyelidiki tentang sikap buruh. Disini pengukuran sikap dilakukan secara tidak langsung, yaitu kepada subjek diperlihatkan gambar-gambar dari para pekerja dalam berbagai konflik situasi. Subjek diminta untuk menceritakan tentang gambar-gambar itu dalam suatu karangan atau cerita.

## 1.9 Skala Sikap

Ada beberapa skala sikap yang dikemukakan oleh para ahli yang sering digunakan yaitu antara lain:

### a. Skala Thurstone

(L.L Thurstone dalam Abu Ahmadi, 2009 :173) percaya bahwa sikap dapat diukur dengan skala pendapat. Mula-mula usaha mengukur sikap ini terdiri atas sejumlah daftar pernyataan yang diduga berhubungan dengan sikap. Metode Thurstone terdiri atas kumpulan pendapat yang memiliki rentangan dari sangat positif ke arah sangat negatif terhadap objek sikap. Pernyataan-pernyataan itu kemudian diberikan sekelompok individu yang diminta untuk menentukan pendapatnya pada suatu

rentangan sampai 11 di mana angka 1 mencerminkan paling positif (menyenangkan) dan angka 11 mencerminkan paling negatif (tidak menyenangkan).

b. Skala Linkert

Rensis Linkert mengembangkan satu skala beberapa tahun setelah Thurstone. Likert juga menggunakan sejumlah pernyataan untuk mengukur sikap yang didasarkan pada rata-rata jawaban. Namun memiliki perbedaan di sana-sini. Likert di dalam pernyataannya menggambarkan pandangan yang ekstrem pada masalahnya. Setelah pernyataan itu dirumuskan, Likert membagikannya kepada sejumlah responden yang akan diteliti. Kepada responden diminta untuk menunjukkan tingkatan di mana mereka setuju atau tidak setuju pada setiap pernyataan dengan 5 (lima) pilihan skala: sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju.

c. Skala Bogardus

(Emery Borgandus dalam Abu Ahmadi, 2009: 175) menemukan suatu skala yang disebut skala jarak sosial (*Social distance scale*) yang secara kuantitatif mengukur tingkatan jarak seseorang yang diharapkan untuk memelihara hubungan orang dengan kelompok-kelompok lain. Dengan skala Borgandus responden diminta untuk mengisi atau menjawab pernyataan satu atau semua dari tujuh pernyataan untuk melihat jarak sosial terhadap kelompok etnik group lainnya.

d. Skala Perbedaan Semantik (*The Semantic Different Scale*).

Skala ini dikembangkan oleh Osgood, Suci, dan Tannerbaum seperti dikutip oleh Abu Ahmadi (2009: 176) yang meminta responden untuk menentukan sikapnya terhadap objek sikap, pada ukuran yang sangat berbeda dengan ukuran yang terahulu. Responden diminta untuk menentukan suatu ukuran skala yang bersifat berlawanan yaitu positif atau negatif, yaitu baik-buruk, bijaksana-bodoh, dan sebagainya. Skala ini terbagi atas 7 (Tujuh) ukuran, dan angka 4 (empat) akan menunjukkan ukuran yang secara relatif netral. Score sikap dari individu diperoleh dengan mentallies (menjumlah) semua jawaban. Score yang lebih tinggi berarti lebih positif sikapnya terhadap objek, orang atau masalah lain yang ditanyakan.

Usaha penyempurnaan yang lebih akhir adalah dikembangkannya tiga kategori perbedaan dimensi sikap sebagai berikut:

1. Kategori perasaan, misalnya : baik/buruk disebut dimensi yang bersifat menilai (Evaluatif dimension).
2. Kategori kekuatan, misalnya : kuat/lemah disebut dimensi kemampuan (Potensi dimension).
3. Kategori sifat, misalnya : cepat/lambat disebut dimensi aktivitas (Activity dimension).

Skala ini dapat digunakan untuk mengukur sikap terhadap semua gejala dari kelompok etnik sampai kelompok partai serta keinginan memiliki anak.

### **1.10 Faktor-faktor Pembentuk Sikap**

Pembentukan sikap tidak terjadi demikian saja, melainkan melalui suatu proses tertentu, melalui kontak sosial terus-menerus antara individu dengan individu-individu lain disekitarnya. Sarlito W. Sarwono (2012: 205-206) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap adalah :

a. Faktor Internal

Yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri orang yang bersangkutan, seperti faktor pilihan. Kita tidak dapat menangkap seluruh rangsangan dari luar persepsi kita, oleh karena itu kita harus memilih rangsangan-rangsangan mana yang akan kita dekati dan mana yang harus di jauhi. Pilihan ini ditentukan oleh motif-motif dan kecenderungan-kecenderungan dalam diri kita. Karena harus memilih inilah kita menyusun sikap positif terhadap satu hal dan membentuk sikap negatif terhadap hal lainnya.

b. Faktor Eksternal

Selain faktor-faktor yang terdapat dalam diri sendiri, maka pembentukan sikap ditentukan pula oleh faktor-faktor yang berada di luar, yaitu :

1. Sifat objek, sikap itu sendiri, bagus atau jelek dan sebagainya.
2. Kewibawaan : orang yang mengemukakan suatu sikap: gambar presiden sedang mengimunisasi bayi dipasang besar-besar di berbagai tempat strategis agar masyarakat terdorong untuk mengimunisasi anak-anak balita mereka.



3. Sifat orang-orang atau kelompok yang mendukung sikap tersebut: Islam versi Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama, dengan banyak program sosial dan pendidikannya terbukti telah menarik jutaan umat sejak berdirinya pada awal abad ke-20, sampai hari ini. Tetapi, banyak umat Islam sendiri bersyukur ketika Front Pembela Islam dikenai sanksi hukum, karena walaupun namanya membela Islam, tetapi caranya yang selalu menggunakan kekerasan tidak disukai oleh umat.
4. Media komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan sikap: di era teknologi sekarang, penggunaan multimedia sangat lebih efektif, ketimbang hanya menggunakan media-media tradisional, apalagi kalau hanya dari ke mulut.
5. Situasi pada saat sikap itu dibentuk: ketika Indonesia sedang dilanda krisis, hampir semua mendukung Gus Dur untuk menjadi presiden, tetapi ketika Gus Dur justru menimbulkan makin banyak krisis, maka orang pun lebih memilih orang lain untuk jadi presiden.

## **2. Tinjauan Tentang Konsep Internalisasi**

### **2.1 Pengertian Internalisasi**

Menurut Abu Ahmadi (2009: 115) “Internalisasi adalah proses norma-norma kemasyarakatan yang tidak berhenti sampai institusional saja, akan tetapi mungkin norma-norma tersebut sudah mendarah daging dalam jiwa anggota-anggota masyarakat”. Pendapat lain (Berger, seperti dikutip F. Budi Hardiman, 2003: 101) mengemukakan bahwa “Internalisasi

merupakan tahap pembatinaan kembali hasil – hasil objektivasi dengan mengubah struktur lingkungan lahiriah itu menjadi struktur lingkungan batiniah, yaitu kesadaran subjektif”.

Sedangkan menurut Bagja waluya (2007: 43) “Internalisasi adalah proses yang menjadi kenyataan sosial yang sudah menjadikan kenyataan objektif itu ditanamkan ke dalam kesadaran, terutama pada anggota masyarakat baru, dalam konteks proses sosialisasi”. Menurut Koentjaraningrat dalam Tedi Sutardi (2007: 58) Proses Internalisasi merupakan proses panjang sejak seorang individu dilahirkan, sampai ia hampir meninggal, dimana ia belajar menanamkan dalam kepribadiannya segala perasaan, hasrat, nafsu serta emosi yang diperlukan sepanjang hidupnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dari pendapat-pendapat tersebut internalisasi adalah sebuah proses penanaman atau penghayatan nilai-nilai ke dalam diri seseorang yang tidak hanya diterima begitu saja tapi dengan berbagai tahapan-tahapan. Proses ini berlangsung selama seseorang menerima sebuah hal-hal yang disampaikan kepadanya.

### **3. Tinjauan Tentang Konsep Nilai**

#### **3.1 Pengertian Nilai**

Secara etimologi, nilai berasal dari kata *value* (Inggris) yang berasal dari kata *valere* (Latin) yang berarti: kuat, baik, berharga. Dengan demikian secara sederhana, nilai (*value*) adalah sesuatu yang berguna, berharga, dan baik.

Irawan Suntoro (2014) Nilai bersifat abstrak, seperti sebuah ide, dalam arti tidak dapat ditangkap melalui indra, yang dapat ditangkap adalah objek yang memiliki nilai. Misal, beras akan bernilai kemakmuran bila dibagikan dan diterima secara adil. Kemakmuran adalah abstrak, tetapi beras adalah riil. Sebuah pantai akan bernilai keindahan apabila dilukis atau difoto. Keindahan adalah abstrak sedangkan pantai bersifat riil. Contohnya lagi keadilan, kecantikan, kedermawanan, kesederhanaan adalah hal-hal yang abstrak. Meskipun abstrak, nilai merupakan suatu realitas, sesuatu yang ada dan dibutuhkan manusia.

Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Misalnya nilai keadilan, kesederhanaan. Orang hidup mengharapkan mendapat keadilan. Kemakmuran adalah keinginan setiap orang. Jadi, nilai bersifat normatif, suatu keharusan (*das hollen*) yang menuntut diwujudkan dalam tingkah laku.

Nilai menjadi pendorong atau motivator hidup manusia. Tindakan manusia digerakkan oleh nilai misalnya, kepandaian. Setiap siswa berharap menjadi pandai atau pintar. Karena mengharapkan nilai itu, setiap siswa tergerak untuk melakukan berbagai perilaku supaya menjadi pandai.

Dalam kehidupan, nilai itu banyak sekali dan beragam. Nilai yang banyak tersebut dapat diklasifikasikan atau digolong-golongkan. Nilai juga memiliki tingkatan.

Menurut Notonegoro dalam Kaelan (2013) nilai ada 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut :

- a. Nilai materiil, sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia.
- b. Nilai vital, sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan.
- c. Nilai kerohanian yang dibedakan menjadi 4 (empat) macam :
  1. Nilai kebenaran bersumber pada akal pikir manusia (rasio, budi, cipta);
  2. Nilai estetika (keindahan) bersumber pada rasa manusia;
  3. Nilai kebaikan atau nilai moral bersumber pada kehendak keras, karsa hati, nurani manusia;
  4. Nilai religius (ketuhanan) bersifat mutlak bersumber pada keyakinan manusia.

#### **4. Tinjauan Tentang Konsep Pancasila**

##### **4.1 Pengertian Pancasila**

Pada suatu objek pembahasan Pancasila akan kita jumpai berbagai macam penekanan sesuai dengan kedudukan dan fungsi Pancasila dan terutama berkaitan dengan kajian diakronis dalam sejarah pembahasan dan perumusan Pancasila sejak dari nilai-nilai yang terdapat dalam pandangan

hidup bangsa sampai menjadi dasar negara bahkan sampai pada pelaksanaannya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Terlebih lagi pada waktu zaman orde lama, dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia kita jumpai berbagai macam rumusan Pancasila yang berbeda-beda, yang dalam hal ini harus kita deskripsikan secara objektif sesuai dengan kedudukannya serta sejarah perumusan Pancasila itu secara objektif.

Oleh karena itu untuk memahami Pancasila secara kronologis baik menyangkut rumusannya maupun peristilahannya maka pengertian Pancasila tersebut meliputi lingkup pengertian antara lain pengertian Pancasila secara etimologis, pengertian Pancasila secara Historis, dan pengertian Pancasila secara terminologis.

#### **4.1.1 Pengertian Pancasila secara Etimologis**

Secara etimologis istilah “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana) adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta.

Menurut Muhammad Yamin dalam Kaelan (2010: 21), dalam bahasa Sansekerta perkataan “Pancasila” memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu :

“*panca*” artinya “*lima*”

“*syila*” vokal i pendek artinya “*batu sendi*”, “*alas*”, atau “*dasar*”

“*syiila*” vokal i panjang artinya “*peraturan tingkah laku yang baik yang penting atau senonoh*”.

Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan “susila” yang memiliki hubungan dengan moralitas, oleh karena itu secara etimologis kata “Pancasila” yang dimaksudkan adalah istilah “*Panca Syila*” dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal “berbatu sendi lima” atau secara harfiah dasar yang memiliki lima unsur. Adapun istilah “Panca Syiila” dengan huruf Dewa nagari i bermakna lima aturan tingkah laku yang penting.

Perkataan Pancasila mula-mula terdapat dalam kepustakaan Budha di India. Ajaran Budha bersumber pada kitab suci Tri Pitaka yang terdiri atas tiga macam buku besar yaitu : Suttha Pitaka, Abhidama Pilaka, dan Vinaya Pitaka. Dalam ajaran Budha terdapat ajaran moral untuk mencapai Nirwana dengan melalui Samadhi, dan setiap golongan berbeda kewajiban moralnya. Ajaran-ajaran moral tersebut yaitu : Dasasyiila, Saptasyiila, dan Pancasyiila.

(Zainal Abidin dalam Kaelan, 2010: 21-22) ajaran Pancasyiila menurut Budha adalah merupakan lima aturan (larangan) atau *five moral principles*, yang harus ditaati dan di laksanakan oleh para penganut biasa atau awam. Pancasyiila yang berisi lima larangan atau pantangan itu menurut isi lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. **Panatipada veramani sikhapadam samadiyani** artinya jangan mencabut nyawa makhluk hidup atau dilarang membunuh.
2. **Dinna dana veramani sikhapadam samadiyani** artinya janganlah mengambil barang yang tidak diberikan, maksudnya dilarang mencuri.

3. **Kameshu micchacara veramani shikapadam samadiyani** artinya janganlah berhubungan kelamin, yang maksudnya dilarang berzina.
4. **Musawada veramani shikapadam samadiyani**, artinya janganlah berkata palsu, atau dilarang berdusta.
5. **Sura meraya masjja pamada tikana veramani**, artinya jangankan meminum minuman yang menghilangkan pikiran, yang maksudnya dilarang minum minuman keras.

Dengan masuknya kebudayaan India ke Indonesia melalui penyebaran agama Hindu dan Budha, maka ajaran “Pancasila” Budhismepun masuk ke dalam kepustakaan Jawa, terutama pada zaman Majapahit. Perkataan Pancasila dalam khasanah kesusastraan nenek moyang kita di zaman keemasan keprabuan Majapahit di bawah raja Hayam Wuruk dan maha patih Gadjra Mada, dapat ditemukan dalam keropak Negarakertagama, yang berupa kakawin (syair pujian) dalam pujangga istana bernama Empu Prapanca yang selesai ditulis pada tahun 1365, dimana dapat kita temui dalam sarga 53 bait ke 2 yang berbunyi sebagai berikut :

**“Yatnaggegwani pancasyiila kertasangkarbgisekaka karma”** yang artinya raja menjalankan dengan setia kelima pantangan (Pancasila), begitu pula upacara-upacara ibadat dan penobatan-penobatan.

(Slamet Mulyono dalam Kaelan, 2010: 22) begitu perkataan Pancasila dari bahasa Sansekerta menjadi bahasa Jawa kuno yang artinya tetap sama terdapat dalam zaman Majapahit. Demikian juga pada zaman Majapahit tersebut hidup berdampingan secara damai kepercayaan tradisi agama Hindu Syiwa dan agama Budha Mahayan

dan campurannya Tantrayana. Dalam kehidupan tersebut setiap pemeluk agama beserta alirannya terdapat penghulunya (kepala urusan agama). Kepala penghulu Budha disebut Dharmadyaksa ring kasogatan, adapun untuk agama Hindu Syiwa disebut Dharmadyaksa ring kasyaiwan.

#### **4.1.2 Pengertian Pancasila secara Historis**

Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama dr. Radjiman Widyodiningrat, mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilah pada sidang tersebut tiga orang pembicara yaitu Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno.

Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut Ir. Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. kemudian untuk memberi nama istilah dasar negara tersebut Soekarno memberikan nama Pancasila yang artinya lima dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah satu seorang temannya yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pembukaan UUD 1945 dimana di dalamnya termuat isi rumusan lima prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila.



Sejak saat itulah perkataan Pancasila telah menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah Pancasila, namun yang dimaksudkan Dasar Negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah Pancasila. Hal itu didasarkan pada atas interpretasi historis terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara, yang kemudian diterima oleh peserta sidang secara bulat.

#### **4.1.3 Pengertian Pancasila secara Terminologis**

Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 tersebut terdiri atas dua bagian yaitu Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan 1 Aturan Tambahan terdiri atas 2 ayat.

Dalam bagian Pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia.

#### **4.2 Pancasila Sebagai Dasar Negara**

Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia berarti Pancasila itu dijadikan dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Rumusan Pancasila itulah dalam hukum positif Indonesia secara yuridis-konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga Negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara, tanpa kecuali. Adapun Rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara RI yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada alinea keempat yaitu sebagai berikut:

maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya Pancasila sebagaimana yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut dituangkan dalam wujud berbagai aturan-aturan dasar/pokok seperti yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945 dalam bentuk pasal-pasal, yang kemudian dijabarkan lagi ke dalam berbagai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat serta peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu sekedar mengenai bagian yang tertulis, sedangkan yang tidak tertulis terpelihara dalam konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan.

Rumusan Pancasila yang terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pembukaan tersebut sebagai hukum derajat tinggi yang tidak dapat diubah secara hukum positif, maka Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bersifat final dan mengikat bagi seluruh penyelenggara negara dan seluruh warga negara Indonesia.

#### **4.3 Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa**

Secara materiil Pancasila sebagai pandangan hidup berisi konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Didalamnya berisi atau mengandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan bangsa Indonesia dan terkandung pikiran-pikiran yang terdalem serta gagasan yang mendasar mengenai kehidupan yang dianggap baik, sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki. Nilai-nilai yang dimaksud telah dimurnikan dan dipadatkan dalam lima dasar/lima sila. Jadi sebagai pandangan hidup Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang

dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut tidak lain adalah :

1. Nilai dan jiwa ketuhanan
2. Nilai dan jiwa kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Nilai dan jiwa persatuan
4. Nilai dan jiwa kerakyatan
5. Nilai dan jiwa yang berkeadilan sosial.

#### **4.4 Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa**

Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, berarti Pancasila adalah sikap mental dan tingkah laku bangsa Indonesia yang mempunyai ciri khas, dan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia berarti bahwa Pancasila adalah gambaran tertulis dan pola perilaku atau gambaran tentang amal perbuatan bangsa Indonesia yang khas yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain. Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yaitu Pancasila memberi ciri khas kepribadian yang tercermin dalam sila-sila Pancasila, yaitu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan dan kesatuan bangsa, berjiwa musyawarah mufakat untuk mencapai hikmat kebijaksanaan, bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## 5. Tinjauan Tentang Nilai-Nilai Pancasila

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia, yang pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dipadatkan dan diabstraksikan oleh para pendiri negara menjadi lima sila dan ditetapkan secara yuridis formal menjadi dasar filsafat negara Republik Indonesia. hal ini sebagaimana ditetapkan dalam ketetapan No. XX/MPRS/1966.

Irawan Suntoro (2014) nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara singkat dinyatakan bahwa nilai dasar dan Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai Pancasila tersebut termasuk nilai etik atau nilai moral. Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk dalam tingkatan nilai dasar. Nilai ini mendasari nilai berikutnya, yaitu nilai instrumental. Nilai dasar itu mendasari semua aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai dasar bersifat fundamental dan tetap.

Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Pengakuan terhadap Tuhan diwujudkan dengan perbuatan untuk taat pada perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya sesuai dengan ajaran atau tuntunan agama yang dianutnya. Nilai ketuhanan juga memiliki arti bagi adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntunan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Manusia perlu diperlakukan sesuai dengan harkat martabatnya, sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya dan sama hak dan kewajiban asasinya. Berdasarkan nilai ini, secara mutlak ada pengakuan terhadap hak asasi manusia.

Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Adanya perbedaan bukan sebagai sebab perselisihan tetapi justru dapat menciptakan kebersamaan. Kesadaran ini tercipta dengan baik bila sesanti “Bhineka Tunggal Ika” sungguh-sungguh dihayati. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/

perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Berdasarkan nilai ini, diakui paham demokrasi yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat.

Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Berdasarkan pada nilai ini, keadilan adalah nilai yang amat mendasar yang diharapkan oleh seluruh bangsa. Negara Indonesia yang diharapkan adalah negara Indonesia yang berkeadilan.

Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional dari negara Indonesia memiliki konsekuensi logis untuk menerima dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai acuan pokok bagi pengaturan penyelenggaraan bernegara. Hal ini diupayakan dengan menjabarkan dengan menjabarkan nilai Pancasila tersebut ke dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan ini selanjutnya menjadi pedoman penyelenggaraan bernegara. Sebagai nilai dasar bernegara, nilai Pancasila diwujudkan menjadi norma hidup bernegara.

Berdasarkan uraian di atas, esensi nilai-nilai Pancasila sebagai berikut :

1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bukan bangsa ateis, taat pada perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya sesuai dengan ajaran atau tuntunan agama yang dianutnya, pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama.
2. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan pengakuan terhadap hak azasi manusia.
3. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengakui dan menghargai terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia, perbedaan bukan sebagai sebab perselisihan tetapi justru dapat menciptakan kebersamaan.
4. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Berdasarkan nilai ini, diakui paham demokrasi yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat.



5. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Berdasarkan pada nilai ini, keadilan adalah nilai yang amat mendasar yang diharapkan oleh seluruh bangsa Indonesia.

## **6. Tinjauan Tentang Konsep Organisasi**

### **6.1 Pengertian Organisasi**

Menurut Chester I. Barnard dalam Sutarto (1993: 22-23) “Organisasi adalah suatu sistem tentang aktivitas-aktivitas kerja sama dari dua orang atau lebih sesuatu yang tak berwujud dan tak bersifat pribadi, sebagian besar mengenai hal hubungan-hubungan”. Sedangkan menurut John D. Millet dalam Sutarto (1993: 25) “Organisasi adalah kerangka struktur dalam mana pekerjaan dari banyak orang dilakukan untuk pencapaian maksud bersama”. Sebagai demikian itu adalah suatu sistem mengenai penugasan pekerjaan di antara kelompok-kelompok orang yang mengkhususkan diri dalam tahap-tahap khusus dari suatu tugas bersama.

Selain itu Dalton E. McFarland dalam Sutarto (1993: 29) juga berpendapat bahwa “organisasi adalah suatu kelompok orang yang dapat disamakan dengan menyumbangkan usaha mereka bagi tercapainya tujuan-tujuan”.

Pendapat lain dari Edgar Schein dalam Sutarto (1993: 35) mengemukakan bahwa “organisasi adalah koordinasi yang rasional dari aktivitas-aktivitas sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan yang jelas, melalui pembagian kerja dan fungsi, dan melalui jenjang wewenang dan tanggung

jawab”. Penulis menyimpulkan dari pendapat-pendapat tersebut organisasi adalah sebuah aktivitas-aktivitas kerja sama antara orang-orang atau sejumlah orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dengan berbagai tugasnya masing-masing guna mencapai tujuan tersebut.

## **7. Tinjauan Tentang Konsep PERADAH Indonesia**

### **7.1 Pengenalan Tentang PERADAH**

Peradah adalah organisasi pemuda Hindu tingkat nasional atau perimpunan pemuda Hindu Indonesia, yang di singkat Peradah Indonesia atau" PERADAH. Peradah berdiri pada tanggal 11 Maret 1984. Peradah ada sampai tingkat Kecamatan atau Desa. di tingkat nasional di sebut Dewan Pimpinan Nasional (DPN),di tingkat Provinsi di sebut Dewan Pimpinan Provinsi (DDP), di tingkat kabupaten atau Kota disebut Dewan Pimpinan Kabupaten(DPK), dan di tingkat kecamatan disebut Komisariat. Peradah merupakan organisasi kepemudaan tingkat nasional yang diakui Pemerintah. peradah terdaftar di kementerian dalam Negeri serta Pemerintahan Pemuda dan Olahraga. Ke-sahan Peradah sebagai organisasi dinatakan dalam Surat Keterangan Terdaftar yang dikeluarkan kedua institusi Negara tersebut.

### **7.2 Latar belakang Berdirinya PERADAH Indonesia**

*Bhinneka Tunggal Ika Tan Hanna Dharma Mangrwa,*

Sejak diakuinya Agama Hindu sebagai agama resmi oleh pemerintah Republik Indonesia, sampai dengan berdirinya Parisada Hindu Dharma

pada tahun 1959, umat Hindu belum memiliki organisasi kemasyarakatan (ormas) skala nasional. Hadirnya ormas nasional bernafaskan Hindu dibutuhkan, mengingat perkembangan populasi umat di seluruh Nusantara. Menghadapi situasi yang makin kompetitif, wadah organisasi formal nasional kian dibutuhkan untuk melakukan koordinasi serta pembinaan dan pendidikan dalam hal dharma agama dan dharma negara.

Sebelum adanya organisasi kemasyarakatan nasional, pranata sosial yang ada dalam komunitas umat Hindu masih bersifat lokal. Dorongan untuk membentuk organisasi kemasyarakatan tingkat nasional bangkit di seluruh kantong umat Hindu di bumi Nusantara ini. Yang semula secara sporadis, baik di kota-kota besar, kampus-kampus, di desa-desa di wilayah pemukiman transmigrasi, dalam bentuk kelompok diskusi, organisasi suka duka krama banjar, dan lembaga sosial local menjadi satu kekuatan berhimpun secara nasional.

Sebagai respon atas dorongan berhimpun yang begitu kuat, pada bulan September 1983, beberapa cendekiawan, mahasiswa, dan generasi muda Hindu di Yogyakarta mengadakan pertemuan untuk mewujudkan sebuah organisasi yang meliputi komponen-komponen cendekiawan, mahasiswa, dan Pemuda Hindu Dharma bertaraf nasional. Pertemuan pada bulan September dilanjutkan pada bulan Oktober 1983, dan menghasilkan suatu keputusan bahwa akan diadakan usaha penjajakan bagi pembentukan sebuah Organisasi Kemasyarakatan Hindu tingkat nasional yang disebut

sebagai Sarasehan Pembentukan/Formatur Ormas Hindu Dharma Tingkat Nasional.

Sarasehan tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 dan 20 Nopember 1983, yang diakhiri dengan sebuah IKRAR yang ditandatangani oleh 150 orang termasuk Drs. I.B Oka Puniatmaja (Parisada), drg. Willi Pradnya Surya (DKI Jakarta), I.B Suandha Wesnawa,SH (Bali), I Wayan Sudirtha,SH (DKI Jakarta), I Ketut Renes (DKI Jakarta), IKA Sudiasna (Bandung), Agung K. Putra Ambara (Bandung), dan K. Sudana,SM.Hk (Bandung).

Bunyi IKRAR tersebut sebagai berikut :

Om Swastiastu,

Kami Umat Hindu yang mewakili komponen-komponen pemuda, mahasiswa, dan cendekiawan dari seluruh Indonesia, berikrar:

Sepakat membentuk organisasi kemasyarakatan tingkat nasional sebagai satu wadah kegiatan dalam melaksanakan Dharma Agama dan Dharma Negara yang berasas tunggal Pancasila.

Dalam merealisasikan tujuan tersebut di atas, kami menyiapkan diri untuk menyelenggarakan Munas (Mahasabha), sebagai tindak lanjut dari kesepakatan ini, di Yogyakarta. Semoga Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa Asung Wara Nugraha atas kesepakatan dan kelanjutan tindakan kami bersama ini.

Om Çanti Çanti Çanti Om

Akhirnya melalui sebuah proses yang panjang dan melelahkan pada tanggal 11 Maret 1984 dideklarasikanlah organisasi kepemudaan Hindu tingkat nasional yang pertama dan diberi nama Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah) Indonesia.

### **7.3 Sejarah Nama PERADAH**

Nama Peradah Indonesia ini diilhami oleh 3 hal:

1. Mpu Bharadah

Seorang puruhita yang sangat terkenal, dalam sejarah Jawa Timur menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Kediri dan Daha. Mpu Beradah kemudian dimonumenkan sebagai Candi Empu Beradah (huruf “b” di Jawa bersamaan dengan huruf “p”).

2. Perada

Nama “Peradah” di Bali merupakan warna kain yang biasa dan umum dipakai dalam upacara-upacara keagamaan yang dikenal dengan sebutan “Kain Perada” yakni berwarna kuning keemasan. Warna kuning keemasan yang diyakini sebagai warna agung khususnya di Bali.

3. Anak Polah Bapa Keperadah

Di Jawa pada umumnya khususnya Jawa Tengah dan DIY ada ungkapan yang sangat bermakna : “Anak polah, Bopo keperadah”, yang artinya kurang lebih “apa bagaimanapun polah (perilaku) Anak, akhirnya Bapaknya yang bertanggung jawab atas perilaku itu”.

### **7.4 Visi dan Misi PERADAH**

#### **7.4.1 Visi PERADAH**

Membangun Generasi Muda Hindu yang mandiri dan demokratis sebagai bagian integral dari Bangsa Indonesia untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan bersama berdasarkan Dharma.

#### **7.4.2 Misi PERADAH**

- a. Mewujudkan kader-kader muda Hindu yang memiliki sradha, jujur, berbudi pekerti luhur yang selalu berpedoman pada ajaran Veda dan nilai dasar Organisasi;
- b. Membentuk kader-kader muda Hindu yang cerdas, berani, dan memiliki integritas sehingga mampu tampil di depan sebagai agen-agen perubahan dalam semua segi kehidupan yang dilandasi oleh semangat demokrasi dan kebersamaan.

#### **7.5 Program PERADAH**

1. Bina Dharma ; meningkatkan sraddha dan bhakti.
2. Bina Warga; memupuk kedewasaan dalam mengatur gerak dan dinamika kekaryaan atau swadharma anggota.
3. Bina kriya; mendukung dan membina setiap aktifitas dan kelembagaan kemasyarakatan.
4. Bina Shadhiwani; berkomunikasi secara nasional untuk mencari dan menemukan murdha wakya (konsep-konsep).
5. Bina Karya; menyumbangkan karya-karya nyata bagi masyarakat.
6. Bina Artha; meningkatkan kesejahteraan ekonomi di lingkungan masyarakat terdekat.

## 7.6 Nilai-nilai PERADAH

Nilai-nilai keteladanan yang menjadi dasar dan karakter organisasi serta anggota organisasi adalah 5 S, yaitu:

1. Sathyamitra: menghargai sesama dan membangun kerjasama berlandaskan kejujuran dan ketulusan;
2. Sadhana: melakukan swadharma sebagai bentuk disiplin spiritual;
3. Sevanam: melakukan pelayanan dan karya-karya nyata bagi umat dan masyarakat luas sebagai upaya merealisasikan nilai-nilai dharma;
4. Samskara: menjadi agen perubahan bagi pembaharuan yang berguna bagi umat manusia;
5. Santosa: bijaksana dalam membangun ketentraman, keharmonisan dan kesejahteraan bersama.

## 7.7 Makna Logo Lambang PERADAH

Lambang PERADAH INDONESIA diungkapkan secara dominan dengan gunung/kayon yang menancap ke bawah, latar belakang padma/teratai berdaun-bunga lima helai.



**Gambar 2.1 Logo Lambang Peradah Indonesia**

## 1. Gunungan/Kayon

Simbul kalpataru atau pohon kehidupan; aslinya disebut “Kayun Purwo Sejati” (kayun = hidup/kemedak, purwo = asal/ sumber). Gunungan menggambarkan asal hidup yang sebenarnya (“sangkanin dumadi” = Bhs. Jawa, “Janma Dhyasya Yatah” = Bhs. Sanskerta). Peradah Indonesia diyakini lahir atas kehendak Hyang Widhi melalui para tokoh umat Hindu Indonesia.

## 2. Isi utama Gunungan adalah Putik Kembang dari Padma / Teratai

Melambangkan kepemudaan/Keremajaan; dilapisi/dilandasi 9 daun putik menggambarkan penginderaan Dewa Sanga (“Babahan Hawa Sanga” = bhs. Jawa); maknanya Peradah Indonesia sebagai organisasi Pemuda Hindu harus dapat mengarahkan dan mengendalikan diri dari segala kekuatan dan nafsu yang ada. Pengarahan dan pengendalian itu ditujukan kepada Swastika, simbul kesucian Agama Hindu yang merupakan daya kekuatan dan kesejahteraan Bhuwana Agung (Macrocosmos) dan Bhuwana Alit (Microcosmos). Swastika beralaskan singgasana bersudut delapan yang disebut Asta Dala sebagai dasar keharmonisan alam, kesucian dan kedamaian abadi. Asta Dala, juga merupakan simbul delapan sifat keagungan Hyang Widhi (“Sad Guna Brhma”), yang meliputi:

- a. *Anima* : mempunyai kekuatan yang dapat merubah diri-Nya menjadi sekecil-kecilnya;
- b. *Lagima* : bersifat ringan atau halus;
- c. *Mahima* : Maha besar meliputi semuanya;



- d. *Prapti* : serba tercapai, segala kehendakNya
- e. *Prakamya* : segala kehendakNya selalu terlaksana
- f. *Içitwa* : beliau mengatur segala yang ada di dunia ini;
- g. *Waçitwa* : tidak ada yang melebihi kekuasaanNya;
- h. *Yatramawasaytwa* : tidak ada yang dapat menentang kodratNya

Di atas Swastika dan Asta Dala tergambar Ketu/Mahkota tersudut 3, yang menyimbulkan iman/keyakinan bathin kepada Hyang Widhi dalam manifestasinya sebagai Brahma, Wisnu dan Çiwa. Tanpa iman yang kuat Peradah Indonesia dapat terombang-ambing dalam kehidupan duniawi ini.

### **3. Fondasi yang kukuh menggambarkan sikap yan teguh dan keyakinan yang mantap**

Fondasi diapit oleh Dua Tugu Penjaga yang melambangkan hakekat kepemudaan adalah penjaga kelestarian. Kedua menggala itu hakekatnya sebagai pengawas kejahatan dan kebaikan; juga melukiskan lahir dan bathin. Sifat hakekat dan sikap bathin Peradah Indonesia ini harus dipertahankan secara teguh dan mantap. Keteguhan dan kemantapan akan dicapai jika Peradah Indonesia mengakar dalam pada haribaan umat Hindu Indonesia; harapan ini dilambangkan dengan Tancep Gunungan yang jelas menjurus kearah bawah, ke bumi pertiwi Indonesia.

### **4. Daun Bunga Teratai yang berjumlah 5 buah**

Gambaran tentang bumi pertiwi Indonesia sebagai perlambang asas Peradah Indonesia adalah Pancasila.

## **5. Kata Peradah Indonesia merupakan singkatan dari Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia**

Bermakna kebijaksanaan, sabar, lapang dada, tawakal, waspada, teguh dan tidak takabur. Dalam khasanah kebudayaan Indonesia, khususnya di Jawa ada ungkapan “Anak Polah Bapak Keparadah”, yang bermakna seperti tersebut di depan. Sebagai istilah ia dilhami oleh nama besar Empu Bharadah, salah seorang puruhita di zaman Kediri/Jawa Timur, yang berhasil membasmi Adharma dalam carita “Calon Arang”. Peradah Indonesia diharapkan tetap dalam mengemban nama besar itu dalam segenap perilaku.

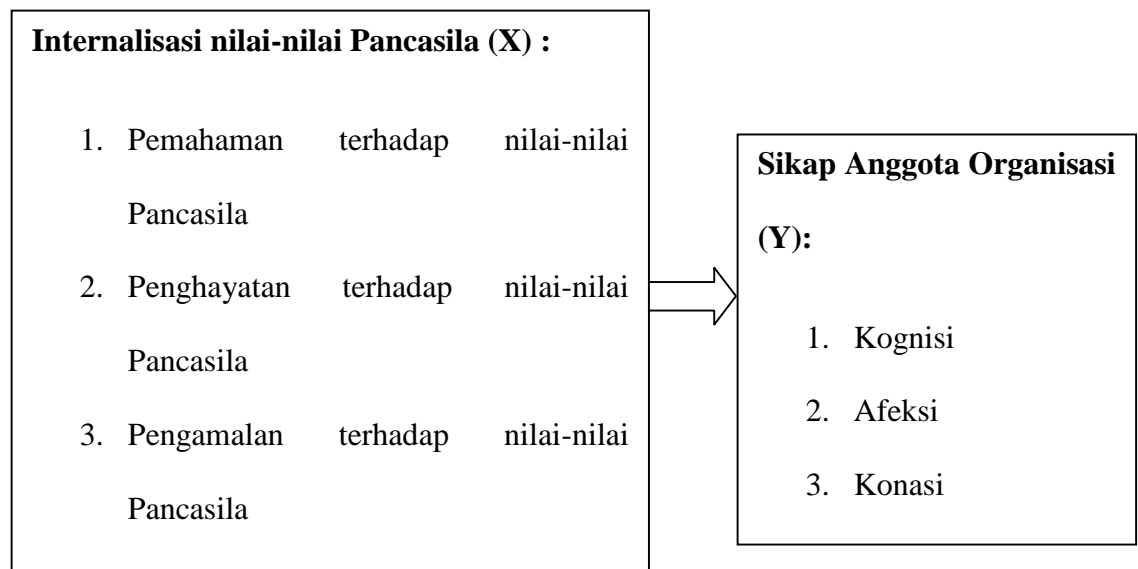
### **B. Kerangka Pikir**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dapat dijelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masyarakat, orang tua, pemuda, maupun anak-anak harus mampu menerapkan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena saat ini kita ketahui bahwa nilai-nilai Pancasila sudah hilang dalam jiwa masyarakat Indonesia. Pemuda bangsa yang seharusnya menjadi agen perubahan bagi negara ternyata semakin jauh dengan nilai-nilai Pancasila.

Organisasi-organisasi kepemudaan yang ada belum mampu membuat pemuda saat ini bermentalkan Pancasila. Walaupun mereka menyadari bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk diamalkan baik dalam kehidupan berorganisasi. Karena dengan berorganisasi lah seorang pemuda dapat terbentuk karakternya.

Dengan demikian peneliti memandang perlu mengkaji penanaman nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap anggota organisasi PERADAH dengan tujuan memberikan wawasan kepada peneliti khususnya dan masyarakat umumnya. Maka peneliti akan melakukan penelitian yang mendalam kepada organisasi tersebut. Untuk mengetahui lebih jelas arah dari penelitian ini, dapat dilihat pada kerangka pikir di bawah ini :

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada bagan dibawah ini :



**Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir**

### **C. Hipotesis**

Menurut Suharsimi Arikunto (1997: 67) “Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampel ada bukti penyajian dan atau pernyataan atau jawaban sementara terhadap rumusan penelitian yang dikemukakan”. Berdasarkan pendapat diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Ho : “tidak terdapat pengaruh internalisasi nilai-nilai Pancasila terhadap sikap anggota organisasi perhimpunan pemuda hindu Indonesia (PERADAH) di Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah”.

H1 : “terdapat pengaruh internalisasi nilai-nilai Pancasila terhadap sikap anggota organisasi perhimpunan pemuda hindu Indonesia (PERADAH) di Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah”.